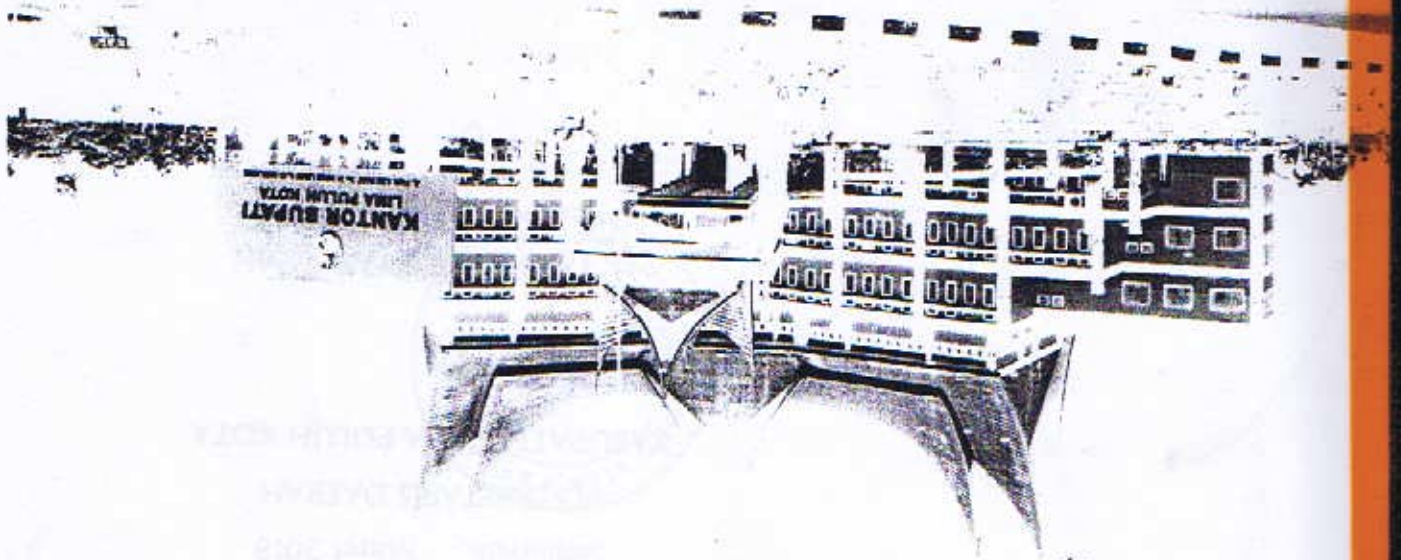


**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN 2017**

**PEMERINTAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA**





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

an rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang tanda tangan di bawah ini:

MA : H. YENDRI TOMAS, SE, MM
 BATAN : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

anjutnya disebut Pihak Pertama

MA : IRFENDI ARBI
 BATAN : BUPATI LIMA PULUH KOTA

aku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

ak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
 kual lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
 gka menengah seperti ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
 berhasil da kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
 tanggung jawab kami.

ak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
 lakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
 ngambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
 nghargaan dan sanksi!

Sarilamak, Februari 2017

PIHAK PERTAMA,
 SEKRETARIS DAERAH

H. YENDRI TOMAS, SE, MM
 NIP. 19610502 198503 1 017

PIHAK KEDUA,
 BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Hukum	Nilai EKPD Peringkat 6 (enam) besar di tingkat Provinsi	52
		Jumlah produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	5 Perda 75 Perbup 500 Keputusan Bupati
2.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perencanaan, Kerjasama Pembangunan, Kerjasama	Jumlah UMKM dan Koperasi yang menggunakan dana bergulir	20 UMKM dan koperasi
		Persentase lancarnya pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lima Puluh Kota yang sesuai dengan aturan perundang-undangan	80%
		Jumlah lembaga pendidikan keagamaan (TPQ, MDTA dan Surau) yang dibina	945 lembaga
		Persentase peningkatan kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti	75%
3.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan	100%
		Persentase capaian Realisasi Anggaran Keuangan Sekretariat Daerah	88,00 %
		Persentase sarana dan prasarana KDH/WKDH dalam kondisi baik	85%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 4.568.431.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 5.725.490.000,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 182.000.000,00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 378.565.000,00
5	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Rp. 1.813.331.000,00

IRFENDI ARBI
BUPATI LIMA PULUH KOTA

H. YENDRI TOMAS, SE, MM
NIP. 19610502 198503 1 017
SEKRETARIS DAERAH

Sarilamak, Februari 2017

NO.	PROGRAM	Jumlah
7	Program Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah	Rp. 214,931,400.00
8	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 1,443,295,500.00
9	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp. 176,290,000.00
10	Program Reformasi Birokrasi	Rp. 320,579,000.00
11	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Rp. 191,011,300.00
12	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 228,721,800.00
13	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp. 42,863,000.00
14	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp. 199,841,000.00
15	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Rp. 1,813,542,500.00
16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp. 96,594,750.00
17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp. 72,858,000.00
18	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp. 63,173,800.00
19	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Rp. 140,102,000.00
20	Program Pengembangan Nilai Budaya	Rp. 335,628,000.00
21	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp. 259,874,010.00
22	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 84,605,000.00
23	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Rp. 1,377,661,100.00
24	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 229,058,300.00
25	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp. 262,070,000.00
26	Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat	Rp. 4,774,118,000.00
27	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Rp. 280,628,125.00
	ANGGARAN	Rp. 25,433,942,585.00

